

KEKALAHAN UMNO-BN MENGHADAPI OPOSISI POLITIK DALAM PILIHAN RAYA KE-14

***Moh. Nizar^{1,2}**

¹⁾*Mahasiswa S3, College of Law, Government and International Studies (COLGIS), Universiti Utara Malaysia*

²⁾*Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung
Jalan Prof. Soemantri Brodjonegoro, No. 1, Rajabasa, Bandar Lampung,
Indonesia*

ABSTRAK

Setelah Perang Dunia II, kolonialisme Inggris bermaksud mengukuhkan kembali hegemoni dan dominasinya di Semenanjung Melayu. Namun, kaum aristokrat Melayu yang terdidik sejak masa kolonial menentang rencana tersebut. Dengan membangun organisasi perjuangan modern, *United Malays National Organisation* (UMNO), mereka memobilisasi gerakan sosial atas dasar ideologi nasionalisme keistimewaan Melayu sebagai penduduk asli Semenanjung. Ideologi yang dibangun sejak awal pendirian UMNO adalah menarik dukungan luas rakyat Melayu dengan tetap melestarikan keberadaan kesultanan yang dibatasi sebagai pemimpin negara, keagamaan dan budaya. Dalam konteks ini, meskipun Undang-Undang Dasar Malaysia membuktikan bahwa hak asasi dan demokrasi sebagai pilar penting Federasi Malaysia, namun ketuanan Melayu secara khusus telah mengukuhkan kekuasaan politik UMNO bersama aliansi Barisan Nasional sebagai pemegang absah dalam pemerintahan Malaysia. Pada perkembangannya, kekuasaan politik UMNO menjadi sangat otoritarian dalam menerapkan ideologi nasionalisme Melayu khususnya di bidang ekonomi. Tragedi 1969 menjadi momentum hegemonik bahwa UMNO harus mengubah kebijakan-kebijakannya agar tetap mendapat dukungan luas dari mayoritas bangsa Melayu di negara Malaysia. Ketika UMNO gagal menerapkan transformasi dalam otoritarianisme, maka masalah-masalah krusial seperti korupsi dan ketidakmampuan melakukan pemulihan ekonomi di hadapan krisis ekonomi dunia tentu konsekuensinya akan mengalami kekalahan politik meskipun hegemoni ideologis nasionalisme Melayu tetap dijalankan.

Kata Kunci: Kekalahan, Umno-Bn, Oposisi Politik, Pilihan Raya Ke-14.

ABSTRACT

After World War II, British colonialism aimed to reinstalled his hegemony and domination in Malay Peninsula. However, Malay aristocrats, the well educated class at the colonialism era opposed the plan. In this case, they built a modern organization, *United Malays National Organisation* (UMNO), as political and social movement based on Malay nationalism to drive Malay peoples as native ones. Their ideology was to extract them while preserve the existence of sultans as supreme head of the country. In this context, even Malay constitution's proved the humanity and democracy as pillar of the country but the sultans allowed the authority to UMNO with Barisan Nasional (Natiional Alliance) at the Malaysia's government. Furthermore, the political of UMNO become more authoritarian on practical Malays nasionalism absolutly at economic field. The May 1969 tragedy gave legitimation for UMNO to reform their policy notably to gets loyalties from the majority of Malay people at the Malaysian government.

* Korespondensi: moh.nizar@fisip.unila.ac.id

Nevertheless, when the transformation of UMNO unseccesfully on practical their otoritarian which various problem like corruption and the dicline of economy due to global financial crisis.

Keywords: Defeat, Umno-Bn, Political Opposition, the 14th Grand Choice.

PENDAHULUAN

Antara tahun 1946 dan 1957, negara-negara Melayu sudah mengalami tiga perubahan konstitusional dan mencapai kemerdekaannya dari Inggris. Rancangan Persatuan Melayu (*the Malayan Union Plan*) yang disusun selama beberapa tahun di London, berlaku pada 1 April 1946 sebagai tanda kembalinya kolonialisme Inggris pasca Perang Dunia II. Sir Edward Gent adalah Gubernur Melayu pertama. Persatuan ini sesungguhnya menyatukan semua negara-negara Malayu dalam koloni tunggal, dan segera menghadapi masalah. Bangsa Melayu, terutama kaum aristokrat, bersatu dalam kepemimpinan Dato Seri Onn bin Jafar dan organisasinya *United Malays National Organisation (UMNO)*, untuk menentang rancangan konstitusional yang mengurangi status dan kekuasaan para Sultan dan memberikan kewarganegaraan pada imigran non Melayu. Bangsa Melayu juga tidak suka terhadap cara Inggris mendesak para Sultan untuk menyerahkan kekuasaan dan mengkhawatirkan dominasi ekonomi ras China.

Pada bulan Januari 1948, rancangan konstitusi baru dibuat untuk mengubah Persatuan menjadi federasi. Konstitusi Federasi Melayu membenahi kedudukan simbolik Sultan dan pembatasan kekuasaan mereka. Namun, masalah dominasi ekonomi China tidak diselesaikan sampai musyawarah kemerdekaan dan pembentukan Komisi Konstitusional Reid pada tahun 1956. Undang-Undang Malaysia dengan tajuk Perlembagaan Persekutuan 1957 sebagai dasar negara merdeka, memuat perlindungan posisi khusus bangsa Melayu sebagai rakyat pribumi dari negeri Melayu dan mengesahkan quato bangsa Melayu dalam pendidikan dan pelayanan sosial. Islam dinyatakan sebagai “agama Federasi” dan bahasa Malaysia sebagai bahasa nasionalnya. (Andrew J. Harding dan James Chin, 2014, h. 86-87).

Sejarah negara Malaysia tidak bisa dipisahkan dari peran politik UMNO dan aliannya, sejak upaya menentang kembalinya kolonialisme Inggris dan kemerdekaan Malaysia. Ideologi utama UMNO adalah pembelaan, perlindungan

dan keistimewaan bangsa Melayu sebagai kaum bumiputera dalam kekuasaan negara. Meskipun tentu saja ada sejumlah masalah penting terkait dengan Singapura dan Brunei, ideologi bumiputera (nasionalisme) ini mampu menarik dukungan luas dari bangsa Melayu, bahkan kemudian kekuatan politik penting di Sarawak dan Sabah mendukung Barisan Nasional (BN) setelah keduanya masuk dalam Negara Federasi Malaysia pada tahun 1963.

Dengan muatan perlindungan terhadap posisi Bumiputera (etnis Melayu) dalam Undang-Undang Malaysia, UMNO mendapatkan dukungan luas dari rakyat Melayu dan mampu mengalahkan oposisinya melalui Barisan Nasional (persekutuan politik dengan kekuatan politik China dan India) yang kemudian diganti dan dikenal dengan Barisan Nasional (BN). Semua perdana menteri Malaysia berasal dari UMNO, sampai pada masa Mohammad Najib Tun Abdul Razak. Pada Pilihan Raya ke-14 (2018), UMNO kalah, namun dengan peristiwa politik yang menarik perhatian publik internasional, yaitu Barisan Nasional sebagai aliansi politik luas UMNO dikalahkan oleh Mahathir Muhammad sebagai salah seorang tokoh penting UMNO, namun dia keluar dari UMNO dan membentuk aliansi politik sendiri.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kekalahan politik UMNO dalam menghadapi pihak oposisi, yang menyebabkan kekalahaannya dalam Pilihan Raya ke-14 Malaysia. Pertanyaan yang penting untuk dikemukakan adalah: (1) mengapa hegemoni UMNO merosot pada momentum Pilihan Raya Umum ke-14?; (2) variable-variable apa saja yang mempengaruhi kemerosotan perolehan kursi UMNO-Barisan Nasional Pilihan Raya ke-14?

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Hegemoni Gramsci

Secara umum, Gramsci menyaksikan kekalahan kelas pekerja Italia dalam perjuangan kelas pasca Perang Dunia I dan kegagalan revolusi sosial di Italia pada masa itu, paruh kedua dari dasawarsa 1920an. Dari dalam penjara, dia menyaring sejumlah pemikiran yang dikaji secara mendalam sebagai penjelasan kesalahan masa silam dan program politik atau teori untuk perjuangan kelas pekerja di masa depan. Karena itu, Gramsci memerlukan strategi baru dalam memahami sejarah

masyarakat atas dasar materialisme historis yang tidak selalu menganalisa struktur (*base*) atau apa yang disebut Gramsci sebagai ekonomisme, namun analisa suprastruktur atau kesadaran sosial.

Ketika materialisme historis dipersempit dalam ekonomisme historis, ia kehilangan banyak potensi bagi pertumbuhan budaya di antara cendekiawan, namun gejala ini kebanyakan mungkin diidap oleh intelektual yang malas, mereka yang selalu ingin memberikan kesan sebagai manusia paling cerdas, dan sebagainya. Seperti ditulis Engels, ia mencipta banyak orang percaya diri bahwa mereka mempunyai semua pengetahuan sejarah dan kebijaksanaan politik di kantong mereka, dengan biaya kecil dan tanpa upaya. Kita juga lupa bahwa tesis Marx—manusia menyadari konflik mendasarnya di ranah ideologi—mempunyai nilai organis. Itu adalah tesis epistemologis, ketimbang tesis psikologis atau moral. Pengabaian tesis penting ini menciptakan bingkai pikiran yang melihat politik dan semua sejarah sebagai suatu tipu muslihat dan kecerdikan pribadi-pribadi. Semua kegiatan budaya juga dipersempit sebagai tipu muslihat “yang dinyatakan”, skandal provokatif dan masalah pribadi dari tokoh-tokoh politik... Karena itu, ekonomisme harus ditentang tidak saja dalam teori historiografi, namun juga dalam teori dan praktek politik. Dengan demikian, perjuangan harus dilancarkan pada ranah konsep hegemoni... (Antonio Gramsci, 1996, h. 186)

Pernyataan bahwa manusia mencapai kesadaran konflik struktural pada tataran ideologi-ideologi, harus diperhatikan sebagai suatu afirmasi epistemologis, bukan hanya muatan psikologis dan nilai moral. Dengan demikian, prinsip teoritis-praktikal dari hegemoni juga mempunyai signifikansi epistemologis. Sumbangan Illich yang terbesar kepada filsafat praxis harus diangkat dalam hal ini. Oleh karena itu, kita bisa menyatakan bahwa Illich memajukan filsafat sebagai filsafat selama dia memajukan doktrin dan praktek politik. Selama perangkat hegemonik menciptakan suatu ranah baru ideologis, pengejawantahannya memugar suatu reformasi kesadaran dan metode pengetahuan: ia adalah suatu fakta pengetahuan, suatu fakta filosofis (Antonio Gramsci, 1971, h. 365–366).

Atas dasar dua bagian dari kajian kritis Gramsci membangun konsep hegemoni sebagai suatu epistemologi untuk menganalisa kondisi sosial politik di Italia dan hubungannya dengan kemerosotan revolusi di Eropa. Lebih dari itu,

nilai kajiannya mempunyai signifikansi internasional, sehingga konsep hegemoni ini diterapkan oleh sejumlah intelektual dalam menganalisa hegemoni AS dan sekutunya (terutama Inggris) pada tataran ekonomi politik global. Jadi, sebagai epistemologi, hegemoni adalah konsep dasar untuk mengetahui atau bagaimana mengetahui secara ilmiah kekuasaan yang diterapkan dalam bidang budaya, hukum dan politik, pendek kata dalam perjuangan kelas di bidang kesadaran atau ideologi.

Namun, analisis kelas dan perjuangan kelas sebagai bagian penting dari materialisme historis dalam *Prison Notebooks* kurang didefinisikan dengan jelas. Gramsci menggunakan istilah kelompok sosial (*social group*) sebagai ganti kata kelas (*class*). Penyulihan ini sebenarnya mengungkap pengertian yang lebih luas dan “umum” sehingga membuka ruang untuk perenungan mendasar. Dalam sebuah artikelnya, Gramsci mencatat bahwa “supremasi dari suatu kelompok sosial diterapkan dalam dua cara: “dominasi” dan “kepemimpinan moral dan intelektual”. Suatu kelompok sosial mendominasi saingan-saingannya dengan kecenderungan “melikuidasi” atau menundukkan mereka melalui penerapan kekuatan militer (*armed force*) dan kepemimpinan kelompok-kelompok aliansi dan rekanannya. (Pozzolini, 1970, h. 73).

Dengan demikian, suatu kelas harus menerapkan fungsi hegemonik sebelum merebut kekuasaan, karena ia tidak boleh hanya bertopang pada kekuatan material dari kekuasaan untuk menerapkan kepemimpinan yang efektif. Gramsci mencatat bahwa konsep revolusi dan internasionalisme, terjalin erat dengan konsepsi negara dan kelas (Pozzolini, h. 73). Jadi konsep kelas ini selalu terkait dengan konsep negara, seperti halnya konsep perjuangan kelas dengan perebutan kekuasaan. Kelas atau kelompok sosial ini adalah kelompok intelektual yang memugar dan menerapkan hegemoni di bidang budaya, hukum dan politik.

Intelektual sebagai kelompok sosial adalah pencipta atau agen yang sebenarnya dari hegemoni dan persaingan hegemonik (*counter-hegemonic*). Mengingat arti penting kelompok sosial ini, Gramsci membahas kaum intelektual secara cukup komprehensif dan rinci, mengenai kedudukan dan fungsinya dalam perkembangan sejarah Italia khususnya dan dunia pada umumnya (Eropa, Rusia dan Amerika). Gagasan utama dari esai Gramsci tentang intelektual menolak

konsep intelektual sebagai kategori kelas sosial otonom. Semua orang secara potensial adalah intelektual dalam arti mempunyai akal dan menggunakannya, namun tidak semua orang mempunyai fungsi sosial intelektual. Fungsi intelektual dalam hubungannya dengan hegemoni mencakup dua kelompok: (1) intelektual “organik”, yaitu unsur pemikir dan organisir dari suatu kelas sosial dasar. Intelektual organik ini kurang terkait dengan pekerja profesi apapun, namun fungsi mereka adalah mengarahkan pemikiran dan aspirasi dari kelas organik mereka; (2) intelektual “tradisional” dalam bidang profesi, kesusasteraan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Posisi mereka di tengah masyarakat adalah pancaran antar-kelas (*inter-class*), namun pada dasarnya berasal dari hubungan kelas masa silam dan kini, dan secara historis menyembunyikan hubungan mereka dengan formasi kelas hegemonik. (Antonio Gramsci, 1992, h. 3).

METODE

Untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, historiografi politik UMNO diangkat, terutama momen-momen pentingnya dalam memugar hegemoninya sampai pada masa kemerosotan. Atas dasar data kuantitatif kekalahan UMNO pada Pilihan Raya ke-14, metode penelitian kualitatif (*qualitative methode*) diterapkan dengan objek UMNO sebagai unit analisis dan “pemilih” sebagai unit eksplanasi. Sumber data penelitian adalah kajian pustaka (*library research*) seperti buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, laporan hasil penelitian, atau laporan-laporan resmi. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data-data tersebut sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini (hegemoni) untuk mencapai kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Momentum Hegemonik

Momentum dalam pengertian leksikal adalah daya pendorong dan kekuatan penggerak (*driving forces*) yang dicapai oleh perkembangan proses atau guliran peristiwa-peristiwa.[†] Perkembangan awal adalah kolonialisme Inggris dan pendudukan Jepang. Dalam Perang Dunia II, kolonialisme Inggris tersingkir dengan pendudukan Jepang yang memodifikasi sejumlah warisan kolonialisme

[†] <https://en.oxforddictionaries.com/definition/momentum>

Inggris. Pada akhir pendudukan Jepang tahun 1945, Burhanuddin Helmi (Pejabat Islam dan Adat Melayu di bawah Pemerintahan Militer Jepang) dan Mustapha Hussain (Wakil Ketua Kesatuan Melayu Muda/KMM), merencanakan kemerdekaan Melayu dengan Undang-Undanganya yang dirancang secara rahasia dan akan dibahas pada sebuah konferensi bersama di Kuala Lumpur pada pertengahan Agustus 1945. Namun rencana ini tidak terlaksana, dengan sejumlah sebab yang menjadi kajian historiografi.

Kelemahan para pemimpin Melayu untuk mendapatkan dukungan rakyat dan menentang Inggris dan Jepang adalah momen penting awal dalam politik Malaysia pasca Perang Dunia II. Di satu sisi, kekacauan sosial pada masa ini mendorong kesadaran Melayu tentang posisi ekonomi dan politik mereka di hadapan dunia non Melayu, di sisi lain, menyebabkan kegoyahan dalam masyarakat mereka sendiri. (Rizal Yaakop, 2014, h. 59).

Dalam kondisi ini, Inggris mengusulkan rancangan *Malayan Union* yang pertama kali dinyatakan pada tanggal 10 Oktober 1945 di London. Ada tiga tujuan penting yang akan dicapai oleh *Malayan Union*: *pertama*, kedaulatan sultan diserahkan kepada kerajaan Inggris; *kedua*, otonomi negara-negara bagian Melayu harus disatukan dalam *Malayan Union*; *ketiga*, *ketuanan* bangsa Melayu atau kedudukan istimewa bangsa Melayu dihapuskan dan semua penduduk mendapatkan hak yang sama. Pemerintahan kolonial sebagai pusat pemerintahan yang kuat dibangun dan penduduk Malaya dianjurkan untuk mematuhi rancangan ini. (Allen dan Unwin, 2003, h. 187) Dengan demikian, Semenanjung Malaya (*Malayan Union*) adalah negara kesatuan dari warga negara umum untuk semua ras, tanpa keistimewaan suku Melayu.

Pada tanggal 11 Oktober 1945, Sir Harold McMichael tiba di Tanah Melayu. Dalam masa tidak sampai dua bulan, McMichael telah memperoleh persetujuan dan tandatangan dari semua Sultan dan Raja negeri Melayu untuk pelaksanaan *Malayan Union*. Akhirnya Kertas Putih *Malayan Union* dibentangkan di London pada 22 Januari 1946. Orang Melayu kecewa dengan kerajaan Inggris, kerana “pecah amanah” (ingkar janji). Sebagai perlawanan terhadap *Malayan Union*, kaum aristokrat berpendidikan, cendekiawan dan kaum terpelajar Melayu melancarkan berbagai pergerakan, persatuan, kesatuan,

persekutuan atau partai di segenap kota, bandar, kampung dan desa. Gerakan sosial yang berorientasikan politik di negeri-negeri Melayu semakin berkembang dengan sokongan massa (Abd Ghapa Harun et al, 2012, h. 28-43). Pada 1 Maret 1946, wakil dari 41 perkumpulan menghadiri Kongres Pan-Melayu (*Pan-Malayan Malay Congress*) di Kuala Lumpur. Salah satu resolusinya adalah pembentukan organisasi persatuan baru, *Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu* atau *United Malay Nationalist Organization (UMNO)* yang dipimpin Dato' Onn Jafaar, sebagai ketua umum (*President*) pertama (Mohd Helmi Abd Rahim et al, 2013, h. 40).

UMNO berhasil memimpin gerakan sosial ini ketika komunitas China dan India tidak peduli dan bahkan mengkritik beberapa programnya. UMNO di bawah kepemimpinan Dato' Onn Jafar, mendorong pembangkangan sipil, salah satunya adalah rapat akbar sebagai protes di Masjid Johor Bahru dengan slogan tuntutan misalnya '*Down with the Sultan*' (maksudnya, Gulingkan Sultan Johor, karena orang-orang Johor menentang Sultan Sir Ibrahim yang menandatangani persetujuan *Malayan Union*). Permusuhan rakyat terhadap Sultan ini menjadi ciri baru dan lestari di tanah Melayu setelah perang dunia II. Inilah bukti kelemahan sosio-politik dari para Sultan karena kesalahan utama mereka dalam menerima kembali kekuasaan kolonial Inggris (James de V. Allen, 1967, h. 33-35.). Dengan demikian, Inggris terpaksa mempertimbangkan pandangan tentang keistimewaan bumiputera Melayu, sehingga rancangan *Malayan Union* tidak pernah terlaksana dan akhirnya dicabut sepenuhnya pada tanggal 1 Februari 1948 dan Federasi Melayu (*the Federation of Malaya*) dibentuk (Mohd Helmi Abd Rahim et al, 2013, h. 40).

Dalam *Federation of Malaya*, kedaulatan para Sultan, otonomi negara-negara bagian dan Ketuanan Melayu[‡], tetap dilestarikan. Kekuasaan pusat yang kuat dibentuk sebagai kekuasaan legislatif, meskipun negara-negara bagian mempunyai hak hukum atas beberapa masalah penting. *High Commissioner* Inggris diangkat sebagai ganti Gubernur dari Kerajaan Inggris. Dengan demikian, dua perkembangan sejarah sudah meysisihkan kekuasaan kesultanan Melayu:

[‡] Suatu konsep politik yang menekankan keutamaan bangsa Melayu dengan kedudukan dan hak khusus sebagai penduduk pertama tanah Melayu, Ooi Keat Gin (2008). *Historical Dictionary of Malaysia*. The Scarecrow Press, Inc. h. 154.

pertama, Pakta MacMichael dan *Malayan Union* 1946-1948 itu sendiri, dan *kedua*, perjuangan kekuasaan politik UMNO sejak berdirinya (Kobkua Suwannathat-Pian, 2009, h. 118).

Momentum penting perlawanan terhadap *Malayan Union* oleh UMNO dan kemenangan hegemoni politiknya sebagai kebangkitan politik modern Malaysia sampai sekarang mempunyai beberapa aspek (Mohd Helmi Abd Rahim et al, 2013, h. 40-41):

1. "Pembentukan partai politik Melayu yang kuat dan diterima oleh mayoritas bangsa Melayu, yakni *Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu* atau *United Malay Nationalist Organization (UMNO)* sebagai platform bangsa Melayu untuk meraih kemerdekaannya. Perkembangan ini menunjukkan reformasi Melayu dan politiknya dari tatanan tradisionalnya menuju politik partai modern. UMNO telah mampu menyatukan bangsa Melayu dengan tujuan yang jelas, berpihak dan terjangkau. Pembentukan partai politik ini menandai penyerapan demokrasi dan proses perjuangan kemerdekaan."
2. "Bangsa Melayu memenangkan hak dan keistimewaan mereka di atas tanah airnya, semenanjung Melayu. Mereka tidak sudi menjadi "pengemis" (seperti sering kali dinyatakan mereka) di tanah airnya sendiri, kehilangan kekuasaan ekonomi, pemerintahan dan hak-hak atas tanah air mereka."

Jadi, UMNO berhasil mengukuhkan hegemoni Melayu di tanah semenanjung Melayu dalam bidang ekonomi, politik dan budaya, sejak negara Persatuan Tanah Melayu (*The Federation of Malaya*), sebagai momentum penting pertama. Momentum penting kedua adalah kemerdekaan bangsa Melayu dari Inggris pada 1957 dengan undang-undangnya, yaitu Perlembagaan Persekutuan (31 Agustus 1957). Namun, hegemoni dalam bidang hukum dasar ini tidak sepenuhnya ditunaikan secara konkret, meskipun UMNO telah berhasil membangun Perikatan (*Alliance*) politik dengan *Malayan Chinese Association* (MCA) dan *Malayan Indian Congress* (MIC).

Momentum penting ketiga dalam politik Malaysia adalah kerusuhan rasial yang berpuncak pada peristiwa 13 Mei 1969. UMNO sebagai partai politik hegemonik di Malaysia tentu saja mempunyai kaitan krusial dengan peristiwa tersebut. Mengapa Malaysia di bawah hegemoni politik UMNO mengalami kerusuhan rasial dalam momentum Pilihan Raya ke-3 pada tahun 1969? Secara

umum, peristiwa ini menunjukkan bahwa hegemoni UMNO di masyarakat mengalami tantangan besar, namun apa sebabnya perlu ditelusuri lebih lanjut.

Persoalan utama dari semua partai politik Malaysia adalah bagaimana memastikan kepentingan bangsa Melayu tidak terancam dalam pembagian kekuasaan politik bagi non Melayu. UMNO gagal mengatasi masalah kemiskinan dari para pemilihnya. Dua anggota *Perikatan* lainnya (MCA dan MIC) juga gagal dalam hal itu, misalnya para buruh China dan India yang mendatangi kota untuk mencari pekerjaan. Jadi pemerintahan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman masih sangat lemah, tidak mampu menerapkan kekuasaan politik untuk menerapkan isi undang-undang dasar dan cenderung melestarikan ekonomi politik sebelumnya dengan sejumlah program ekonomi pedesaan (lihat Jomo Kwame Sundaram, Wee Chong hui, 2014, h. 2). Alternatif organisasi politik lahir dari kondisi ini, yaitu *Democratic Action Party* (DAP) pada tahun 1966 yang berbasis pada keturunan China, dan *Gerakan* (Gerakan Rakyat Malaysia atau *Malaysian People's Movement*) pada tahun 1968 (Allen dan Unwin, 2003, h. 230).

Akibatnya, pada Pilihan Raya ke-3, 10 Mei 1969, UMNO dan MIC kehilangan beberapa kursi parlemen kota, bahkan MCA sangat banyak kehilangan dukungan dari para pemilih China di kota. Sebagai gantinya, DAP dan Gerakan berhasil merebut kursi dan dirayakan oleh para pendukungnya dengan aksi massa di jalan-jalan Kuala Lumpur pada tanggal 11 dan 12 Mei, sehingga memicu UMNO untuk mengorganisasikan aksi massa tandingan. Pada tanggal 13 Mei 1969, kerusuhan rasial bergolak sehingga menurut berita resmi menimbulkan korban 177 orang mati (mayoritas ras China), dan 340 orang terluka. Pada tanggal 15 Mei, keadaan darurat diumumkan dan *Internal Security Act* (ISA) diberlakukan untuk menahan siapapun tanpa pengadilan. National Consultative Council (NCC) dibentuk di bawah kepemimpinan Tun Razak sebagai wakil perdana menteri untuk memulihkan situasi. 5.750 orang ditahan. Kuala Lumpur dipenuhi oleh orang yang kebingungan mencari keamanan dan lebih dari 15.000 orang mengungsi di stadion-stadion kota (Allen dan Unwin, 2003, h. 231-235).

Dengan demikian, Pilihan Raya ditunda dan NCC ditugaskan untuk memulihkan hukum dan tatanan negara Malaysia sebagai ganti pemerintahan Tunku Abdul Rahman yang gagal menjalankan politik UMNO dan menimbulkan

kerusuhan rasial tersebut. Inilah momentum penggantian kekuasaan internal UMNO untuk penggantian Perdana Menteri Malaysia sekaligus ketuanya. Ketua NCC sekaligus Perdana Menteri Malaysia yang baru adalah Tun Abdul Razak dan anggota dewan nasional ini meliputi semua pimpinan kelompok politik kecuali DAP. Meskipun demikian, NCC meninjau faktor-faktor kerusuhan dengan seksama, yaitu rencana pembangunan desa tidak menyentuh rakyat dan kawasan yang benar-benar memerlukan—industri desa, perikanan, koperasi, pendidikan pertanian, kredit desa dan pemasaran hasil pertanian. Tingkat pengangguran orang Melayu juga sangat tinggi, diikuti oleh orang India. Bangsa Melayu hanya mencapai 1 persen investasi di usaha-usaha resmi/terdaftar.

Tim penasihat Tun Abdul Razak menyatakan bahwa kebijakan Tunku tidak meningkatkan kinerja ekonomi pada umumnya sehingga diperlukan suatu rencana pembangunan baru untuk membenahi perusahaan milik asing, langkah efisien untuk mengubah ekonomi Malaysia, meningkatkan partisipasi Melayu dalam perusahaan umum milik negara dan pendidikan bagi orang Melayu. Rencana ini dikenal dengan *New Economic Policy* (NEP). NEP mengesahkan peningkatan campur tangan pemerintahan dan perluasan sektor publik untuk peningkatan kesejahteraan antar etnis dan pembangunan desa yang terbengkalai dalam mengurangi kemiskinan. Industrialisasi berbasis ekspor juga menciptakan lapangan kerja yang berarti, terutama bagi perempuan, sementara peningkatan pendapatan minyak bumi mendanai belanja negara yang meningkat (Jomo Kwame Sundaram, Wee Chong hui, 2014, h. 2).

Momentum hegemonik UMNO dalam sejarah politik Malaysia ini menandai bahwa meskipun UMNO telah mampu mengukuhkan ideologi nasionalisme Melayu dalam undang-undang dasar (hukum), namun dalam bidang politik senantiasa mengalami pergolakan internal dari pergantian kepemimpinan dengan tetap berdasar pada hegemoni hukum dan sejumlah amandemen yang tak signifikan atau bersifat *ad hoc*, seperti masalah Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei. (Lihat *Undang-Undang Malaysia, Perlembagaan Persekutuan*, Mengandung pindaan terkini - Akta 1260/2006). Makalah ini membatasi kajian pada hegemoni di bidang politik, dan menyisihkan hegemoni budaya.

Pergolakan Politik Umno

Malaysia mengalami suatu pertentangan sengit dalam pergantian pemerintahan, tantangan politik untuk menggusur koalisi pemerintahan yang masih bercokol, yaitu Barisan Nasional (BN) yang dipimpin oleh UMNO, dari kekuasaannya sejak 1957. Pergolakan ini adalah demokratisasi sinambung ketika kekuasaan BN ditantang oleh oposisi di parlemen, tuntutan kebebasan politik yang terus meningkat dan liberalisasi politik (lihat Thomas Pepinsky, March 2012 dan Bridget Welsh, 2013).

Benedict Anderson berpendapat bahwa negara (Malaysia) mewarisi (lalu mengembangkan) hukum anti subversi dan pemerintahan baja dari rejim kolonial. Karena itu, Malaysia adalah pemerintahan otoritarian permanen, suatu kondisi yang bebas berbuat apa saja dengan ketentuan kolektif untuk pihak kelompok etnik Melayu (52 persen) dalam memonopoli kekuasaan politik riil di hadapan ras China (35 persen) dan India (10 persen).

Setelah kemerdekaannya, Malaysia secara bertahap berubah dari eksportir produk pertanian kepada industrialisasi dan otoritarianismenya terutama dipertahankan melalui undang-undang (Ariel Heryanto and Sumit K.Mandal, Ed., 2003, h. 4). Namun setelah enam dasawarsa kekuasaan UMNO-BN, pada Pilihan Raya ke-14 tahun 2018, hegemoni politik UMNO-BN runtuh, kehilangan 40% kursinya dari 222 kursi parlemen, dan gugurnya kekuasaannya dalam pemerintahan.

Variabel atau faktor dari kekalahan ini terdiri dari unsur pergolakan internal dan eksternal. Unsur internal adalah keluarnya Mahathir Mohamad dari UMNO dan membentuk aliansi politik dengan kekuatan politik oposisi yang membesar pada masa pemerintahan Najib, terutama Anwar Ibrahim dan istrinya. UMNO-BN menguasai pemerintahan secara otoritarian, maka monopoli kekuasaan atas media massa, penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang fiskal, keamanan dan sumber daya pemerintahan lainnya, patronase politik yang mencolok, serta korupsi selama kekuasaannya bercokol. Semua unsur internal yang melekat pada UMNO-BN ini menimbulkan kekecewaan luar biasa dan perlawanan dari rakyat Malaysia yang direpresentasikan oleh oposisi organisasi

politik atau aksi-aksi massa (Jomo Kwame Sundaram, Wee Chong hui, 2014, h. xv).

Kasus Korupsi Najib adalah isu besar yang cukup mengguncang politik Malaysia. Namun, lebih dari itu, dalam kondisi krisis sinambung ekonomi politik internasional, neoliberalisme terus diterapkan di Malaysia dan semakin gencar pada masa Perdana Menteri Najib. Sementara itu, patronase Mahathir dalam UMNO juga sangat kuat, sehingga ketika dia keluar dari UMNO, klien-kliennya turut keluar atau melancarkan kritik tajam terhadap UMNO.

Akan tetapi, pergolakan politik dalam perebutan kekuasaan di Malaysia, ideologi “ketuanan Melayu” tetap bertahan sebagai bingkai umum dari kelas borjuasi Malaysia di hadapan kekuasaan para Sultan. Kelas borjuasi (Melayu) Malaysia ini terbentuk sejak NEP diterapkan dan kian meningkat serta membesar pada masa pemerintahan Mahathir. Mereka menjalankan otoritarianisme sejak Tun Abdul Razak, dan semakin dikukuhkan oleh Mahathir. Setelah oposisi Mahathir menang dalam Pilihan Raya ke-14, dia kembali menjadi Perdana Menteri yang tentu saja tak bisa dilepaskan dari karakter pemerintahannya di masa silam. Mahathir masih mempunyai sejumlah program politik yang belum tunai, seperti pengurangan kekuasaan Sultan dan penuntasan visi 2020 lainnya. Namun, faksi-faksi borjuis konservatif yang menghambat demokratisasi dan oposisinya dari berbagai kalangan masyarakat sipil, akan menentukan perkembangan Malaysia di masa depan.

KESIMPULAN

Kalangan aristokrat yang terdidik dalam lembaga pendidikan Inggris adalah para pembentuk hegemoni “ketuanan Melayu” dikukuhkan dalam hukum, media massa, diskusi-diskusi, pendek kata sarana gerakan sosial modern. Mereka adalah agen utama hegemoni di bidang hukum dan politik. Isi utama adalah keistimewaan bangsa Melayu dalam transformasi pasca kolonialisme Inggris. Dalam kerangka hegemoni ini, pergolakan politik pergantian kekuasaan berlangsung dengan semena-mena, atas dasar warisan hukum anti subversi yang dikenal dalam negara Malaysia sebagai *Internal Security Act* (ISA). Akan tetapi, tidak semua kalangan ilmuwan menjadi intelektual organik bagi UMNO-BN. Generasi muda (mahasiswa) terutama tetap menjadi kekuatan penantang

hegemoninya. Aksi-aksi perlawanan rakyat dan kaum muda berlangsung sejak krisis moneter melanda Asia pada tahun 1998. Kaum muda dan rakyat pada umumnya sudah mencapai titik jenuh dalam kekuasaan otoriter generasi tua Malaysia, dan mendapatkan salurannya secara politik di parlemen atau ekstra parlemen, termasuk aktivitas *non governmental*.

Hegemoni nasionalisme Melayu di Malaysia dalam bidang hukum, budaya dan agama yang anti fundamentalisme Islam, atas dasar dominasi ekonomi bangsa Melayu, bersifat mutlak. Dalam bidang politik, terutama lembaga atau partai politik bersifat nisbi sehingga meskipun UMNO dan dominasi atas aliansinya yang merentang sampai 3 dekade, dengan pergolakan pergantian kepemimpinannya sekaligus Perdana Menteri Malaysia, tetap bersifat nisbi atau tergantung pada tuntutan kondisi ekonomi politik dalam negeri dan perkembangan luar negeri. Pilihan Raya ke-14 membuktikan bahwa lembaga politik dari hegemoni politik nasionalisme Melayu yang ditubuhkan dalam UMNO dipatahkan sendiri oleh sosok penting dalam pengukuhannya, yaitu Mahathir Mohammad. Partai politik adalah bentuk relatif dari isi hegemoni nasionalisme Melayu dari muncul dan berkembangnya faksi-faksi borjuasi Melayu di hadapan kekuasaan terbatas dari para Sultan dan imperialisme dalam konteks negara Commonwealth Inggris Raya.

Kekalahan UMNO-BN dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, dalam negeri dan luar negeri. Dialektika ini menggugurkan hegemoni UMNO dalam politik Malaysia, dan akan sangat berpengaruh kepada masa selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariel Heryanto and Sumit K.Mandal, Ed., *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia, Comparing Indonesia and Malaysia*, RoutledgeCurzon, London, 2003.
- Abd Ghapa Harun et al, "Cendekiawan Melayu, Media Melayu dan Gerakan Anti-Malayan Union, *Malaysia Dari Segi Sejarah*, Volume 40, 2012.
- Allen dan Unwin, *A Short History of Malaysia*, Virginia Matheson Hooker 2003.
- Antonio Gramsci, *Prison Notebooks*, Vol. II, disunting dan diterjemahkan Joseph A. Buttigieg, Columbia University Press, New York, 1996.

Andrew J. Harding dan James Chin, *50 Years of Malaysia, Federalism Revisited*, Marshall Cavendish International, Marshall Cavendish Editions, Singapore, 2014.

Selections From The Prison Notebooks of Antonio Gramsci, Hoare and Nowell-Smith, London, 1971.

Pozzolini, *Antonio Gramsci: An Introduction to His Thought*, Pluto Press, 1970.

Selections From The Prison Notebooks Of Antonio Gramsci, disunting dan diterjemahkan Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, International Publishers, New York, cetakan ke-11, 1992.

Mohd Helmi Abd Rahim et al, 2013, A “Memoryscape” Malayan Union 1946: The Beginning and Rise of Modern Malay Political Culture, *Asian Social Science*, Vol. 9, No. 6; 2013.

James de V. Allen, *The Malayan Union*, New Haven: Yale University, Monograph series no. 10, Southeast Asian Studies, Yale University, 1967.

Kobkua Suwannathat-Pian, British Colonial Rule, Japanese Occupation, and the Transformation of Malay Kingship 1930s-1957, *New Zealand Journal of Asian Studies* 11, 1 June 2009.

Jomo Kwame Sundaram, Wee Chong hui, *Malaysia@50: Economic Development, Distribution, Disparities*, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 5 Toh Tuck Link, Singapore, 2014.

Thomas Pepinsky, *Tak Nak Mereform: New Media and Malaysian Politics in Historical Perspective*, Paper presented at the Asian Studies Association, March 2012 dan Bridget Welsh, 2013.

Undang-Undang Malaysia, Perlembagaan Persekutuan, Mengandungi pindaan terkini - Akta 1260/2006.